

KINERJA KEMANDIRIAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) BERBASIS PEREMPUAN STUDI PADA WILAYAH PESISIR KABUPATEN TANGERANG

Mukhaer Pakkanna
STIE Ahmad Dahlan Jakarta
E-mail: mukhaer@stiead.ac.id

Abstract

The one of the formal financial media that can reach (outreach) and welfare of poor rural communities is through MFIs (Microfinance Institutions). Of course, the MFI is the 'healthy' and financially independent. This study aims to reveal the performance of financial independence (MFIs semi-formal, especially the cooperative of the female members based) on the fishery area, North Tangerang, Banten. In addition, it also reveals the performance of MFIs in increasing the coverage to members. Hence, to address the issue of technical guidelines on the use of performance indicators (sustainability) of financial from regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises republic of Indonesia No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 and indicators organized by Ledgerwood (1999). The research found the fact that the MFI fishing communities (coastal) recorded the 'healthy' category (KCP Pakuhaji = 93.40, KCP Mekar Baru = 85.90 and KCP Mauk = 79.90). In addition, the size of the financial health also seen a low level of bad debts (nonperforming loan) on a MFIs semi-formal members. The low nonperforming loan strongly associated with the institutional capacity to implement financing programs that already in the early design and is compatible with the wishes of the members.

Kata kunci: kinerja keuangan, UMKM, non-performing loan, perempuan perdesaan

PENDAHULUAN

Kinerja lembaga pembiayaan perdesaan, terutama bagi lembaga keuangan mikro (LKM) kerap kali dilihat dari dua sisi yaitu sisi pencapaian sasaran (*outreach*) dan segi kelangsungan hidup lembaga (Chaves dan Gonzales-Vega 1996; Ledgerwood, 1999; Yaron, 1992; Yaron, 1994; dan Yaron *et al*, 1998, seperti dikutip dalam Arsyad, 2008). Selain itu, kinerja LKM juga dilihat sejauhmana dampak operasionalnya itu di tengah-tengah masyarakat, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan (*welfare impact*) (Meyer 20012, Kereta, 2007). Dalam konteks kinerja keuangan (*financial sustainability*), Meyer (2002) mengingatkan bahwa "*the financial sustainability of MFIs is important as the poor benefit most if they have access to financial services over time rather*

than receive just one future loan but denied future loans because the MFI has disappeared".

Menurut Meyer (2002), ada dua alat ukur keberlanjutan dalam menilai kinerja LKM: (1) keberlanjutan operasional (*operational self-sustainability*) dan (2) kemandirian keuangan (*financial self-sustainability*). Kemandirian operasional adalah ketika pendapatan operasional cukup memadai menutupi biaya operasional seperti gaji, persediaan, kerugian pinjaman, dan biaya administrasi lainnya. Sementara kemandirian keuangan adalah tatkala LKM juga dapat menutupi seluruh biaya dana dan bentuk lain dari subsidi yang diterima LKM dengan standar nilai pasar.

Meyer (2002) menunjukkan bahwa "mengukur keberlanjutan keuangan meng-

haruskan LKM mempunyai rekening keuangan yang baik, sehat, dan mengikuti praktik akuntansi yang diakui, memberikan transparansi penuh untuk pendapatan, biaya, pemulihan kredit, dan potensi kerugian". Sementara berkait indikator keberlanjutan keuangan, Khandker *et al* (1995) menunjukkan bahwa pengembalian pinjaman (diukur dengan angka "gagal") bisa menjadi indikator lain untuk keberlanjutan keuangan LKM, karena, tingkat gagal bayar (*default*) yang rendah akan membantu untuk mewujudkan operasional pinjaman yang sehat bagi LKM dan nasabahnya ke depan.

Sementara Rai dan Anil (2011) membandingkan kinerja keuangan LKM (yang bernama NBFC) dan Bank (yang bernama bank SEWA) yang beroperasi di India, dengan menggunakan ukuran kesinambungan keuangan (*financial sustainability*) yang disepekat dalam TRIAS di Brussels (2005) dengan melihat perbedaan dalam pada empat kelompok: (1) kualitas portofolio; (2) efisiensi dan produktivitas; (3) manajemen/manajemen risiko keuangan; (4) profitabilitas dan keberlanjutan. Kemudian merujuk indikator yang digunakan ACCION (Devaney, 2004) dan Women's World Banking (2005) juga memberikan beberapa alat ukur yang populer dengan menggunakan indikator CAMEL yang terdiri dari: C = *capital adequacy* (kecukupan modal) yang berkaitan dengan *leverage*, cadangan kecukupan, dan lainnya); A = *asset quality* (kualitas asset) yang berkaitan dengan PAR, *write off ratio*, dan lainnya); M = *management* (manajemen) yang berkaitan dengan SDM, proses, kontrol dan audit); E = *earnings* (pendapatan) yang berkaitan dengan ROE, efisiensi operasional, dan lainnya); dan L = *liquidity and sensitivity to market risk* (likuiditas dan sensitivitas risiko pasar) yang berkaitan dengan proyeksi arus kas, dan lainnya).

Selain CAMEL, terdapat pula alat analisis lainnya yang disebut PEARLS yang mencakup aspek: P = *protection*; E = *earnings*; A = *asset quality*; R = *rates of return and cost*; L = *liquidity*; dan S = *sign of growth*. Dalam praktiknya, proses interaksi pembiayaan/kredit

antara LKM dengan nasabah terjadi dengan optimal apabila LKM yang memiliki kapasitas dengan indikator-indikator tersebut berhadapan dengan nasabah yang memiliki 5C, yakni *character, condition, capacity, capital, dan collateral* (Lennon dan Richardson, 2002)

Di sisi lain, dalam banyak studi tentang LKM, ihwal kualitas portfolio khususnya dalam melihat tingkat pengembalian (*repayment rate*) merupakan indikator kinerja keuangan yang paling penting. Karena indikator tersebut merupakan prasyarat agar sebuah LKM mampu mandiri dan keberlanjutan dalam jangka panjang (Arsyad, 2008; Christen, 1998). Pencapaian tingkat pengembalian pinjaman yang tinggi merupakan prasyarat utama (*necessary condition*) bagi sebuah LKM untuk kelangsungan dalam jangka panjang. Kerugian pinjaman acapkali menjadi biaya terbesar yang harus ditanggung oleh LKM tersebut dan menjadi penyebab utama kebangkrutan dan ketidaklikuiditasnya (Arsyad, 2008).

Kemudian bagi Ledgerwood (1999), *leverage* dan rasio kecukupan modal (CAR) mencerminkan struktur dan kecukupan modal LKM. Modal yang cukup merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi kesehatan dan kelangsungan LKM karena modal yang cukup mendorong para pemberi pinjaman (jika LKM tersebut meminjam dana dari, misalnya, bank umum) dan para penabung (nasabah) untuk percaya kepada LKM tersebut dalam kaitannya dengan kemampuan untuk menanggung kerugian dan mendanai pertumbuhan di masa mendatang. Bagi Ledgerwood (1999), LKM manapun harus mempertahankan keseimbangan yang tepat antara utang dan ekuitas untuk menjamin bahwa ekuitas atau kelayakan lembaga tersebut dalam keadaan sehat.

Berkait upaya menganalisis dampak keberadaan LKM terutama yang beroperasi di wilayah perdesaan, Ledgerwood (1999) mengidentifikasi variabel-variabel dampak LKM dengan menggunakan metode-metode kuantitatif, baik pada tataran perusahaan (usaha kecil), rumah tangga, maupun individu. Variabel yang terkena dampak tersebut, secara

umum dipengaruhi oleh tujuan LKM, penetapan target langsung maupun tidak langsung, aliran dana yang dimiliki dan kapasitas untuk melayani kredit, persyaratan ekuitas minimal, *moral hazard*, dan ukuran pasar.

Dalam rangka mewujudkan dampak tersebut, beberapa indikator kinerja yang perlu diperhatikan dalam menganalisis optimalnya peran LKM, yang menurut Ledgerwood (1999) terdiri dari: (1) kualitas portofolio yang digambarkan oleh tingkat pengembalian pinjaman cicilan, rasio kualitas portofolio, dan rasio kehilangan pinjaman; (2) rasio produktivitas dan efisiensi; (3) keberlangsungan pembiayaan; (4) rasio keuntungan, seperti pengembalian aset, pengembalian bisnis, dan ekuitas; (5) penyaluran dana dan kecukupan modal; (6) indikator skala dan kedalaman jangkauan.

Sementara itu, bagi Rosenberg (2009) meyakini terdapat beberapa indikator keuangan yang tepat dan bisa dipakai dalam mendiagnosis tingkat kesehatan LKM. Hampir sama dengan bank dan lembaga komersial lainnya, ukuran yang paling umum dari profitabilitas adalah ROA, yang mencerminkan kemampuan organisasi untuk menggunakan aset-aset yang menguntungkan, dan ROE, yang mengukur pengembalian yang dihasilkan atas investasi pemilik.

Menurut Rosenberg (2009), ini adalah indikator yang tepat untuk lembaga yang tidak menerima subsidi, terutama dari donor dan investor sosial, dalam bentuk paling sering hibah atau pinjaman dengan tingkat bunga di bawah pasar, bentuk hibah yang biasanya berurusan dengan lembaga yang menerima subsidi yang cukup besar. Dalam kasus tersebut, pertanyaan kritis adalah apakah lembaga akan mampu mempertahankan dirinya dan tumbuh bila subsidi tidak lagi tersedia? Untuk menentukan ini, pelaporan keuangan harus disesuaikan untuk mencerminkan dampak dari subsidi ini.

Kemudian berkaitan penyesuaian inflasi (*inflation adjustment/IA*), maka aset dalam mata uang tertentu dikurangi kewajiban dalam jumlah mata uang dikali tingkat inflasi untuk periode tersebut. Penyesuaian ini biasanya didasarkan pada nilai aktiva bersih pada awal periode, tetapi menggunakan periode rerata yang mungkin cocok untuk LKM yang menerima hibah besar atau injeksi dari modal, selama periode tertentu. Tentu, penyesuaian ini mencerminkan hilang-nya nilai riil (yaitu, daya beli) aset moneter bersih LKM akibat digerus inflasi. Tentu, hal ini lazimnya mengurangi laba bersih

Berbeda dengan Rosenberg (2009) dalam melihat indikator keuangan murni LKM tanpa subsidi dan hibah, maka bagi Khandker, Khalily, dan Khan (1995) yang menelaah kinerja keuangan Grameen Bank (GB) di Bangladesh, mengemukakan bahwa kelangsungan hidup GB tergantung pada struktur pendapatan dan biaya serta sejauh mana subsidi yang diberikan oleh lembaga donor dan lembaga keuangan setempat, termasuk dari Bank Sentral Bangladesh. Konsep kelayakan finansial dan ekonomi yang digunakan adalah untuk memeriksa sejauhmana implikasi dari subsidi dan efisiensi operasional pada viabilitas. GB adalah layak secara finansial jika subsidi keuangan adalah nol atau negatif. Hal ini dianggap layak secara ekonomi jika besaran subsidi adalah nol atau negatif. Maka, secara teori perbankan, maka mungkin layak secara finansial tetapi tidak layak secara ekonomis jika keuntungan tidak sesuai dengan subsidi ekonomi yang diperoleh.

Kelangsungan keuangan dari GB pada tingkat agregat tidak selalu berarti bahwa cabang yang layak secara finansial namun adanya struktur biaya dan pendapatan mereka terima berasal dari kantor pusat, dan kemudian dipasok ke cabang dengan tingkat bunga 8%-10%. Selain itu, kantor pusat, bukan cabang, kerap kali pula berinvestasi di portofolio, serta melakukan pengembangan dalam hal non-finansial, yakni menanggung kegiatan terpusat, misalnya, pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan melakukan pemantauan atau evaluasi biaya di seluruh cabang di Bangladesh.

Oleh karena itu, bagi Khandker, Khalily dan Khan (1995), isu kelangsungan keuangan perlu dijelaskan secara terpisah pada tingkat agregat dan masing-masing cabang. Yang pasti, tingkat viabilitas GB dapat dilihat dari tingkat ke-langsungan hidup yang dievaluasi dengan menggunakan tiga parameter, yakni profitabilitas, tingkat subsidi yang diterima, tingkat ketergantungan dan produktivitas modal. Profitabilitas mencerminkan jumlah subsidi keuangan dibutuhkan, sementara ketergantungan subsidi menunjukkan ketergantungan pada penentuan program subsidi keuangan.

Mengingat LKM sebagai perantara keuangan yang bertujuan menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh kredit bagi orang-orang berpenghasilan rendah, LKM tersebut diharapkan memiliki kemampuan finansial (*financially viable*) untuk mencapai kemandirian (*self-sustainability*). Oleh karena itu, pengukuran kinerja salah satunya harus didasarkan pada kemampuan keuangannya. Menurut Arsyad (2008), kemampuan finansial merupakan kemampuan lembaga keuangan mikro untuk menutup biaya-biaya operasionalnya dengan pendapatan yang diterima. Karena itu, efisiensi biaya harus menjadi perhatian utama untuk mencapai kemandirian LKM (Khandker, 1998).

Namun, secara teoritik, pengukuran kinerja tidak hanya didasarkan pada kemandirian tetapi juga jangkauan LKM tersebut, diukur dalam luasnya cakupan keluarga yang menjadi target dan besar jasa yang mereka terima. Kedua kriteria ini, kemandirian dan jangkauan yang saling melengkapi, telah menjadi alat pem-banding dalam evaluasi kinerja LKM (Yaron, Benjamin, dan Charitonenko, 1998; Chaves dan Gonzales-Vega, 1996; Arsyad, 2008).

Dalam perkembangan berikutnya, laporan CGAP (2009) di Bangladesh menggunakan alat dasar untuk mengukur kinerja keuangan dalam secara minimalis dilihat dalam lima indikator, yakni: (1) jangkauan atau luasnya jangkauan, termasuk jumlah nasabah aktif atau rekening; (2) jangkauan kedalaman, yakni rerata saldo

per klien atau rekening; (3) pembayaran pinjaman, yakni *portofolio at Risk* (PAR) atau pinjaman berisiko (LAR) atau tingkat pemulihan saat ini (CRR) bersama-sama dengan pinjaman tahunan tingkat kerugian (ALR); (5) kesinambungan keuangan, berkaitan dengan profitabilitas bagi lembaga nonsubsidi: ROA atau untuk lembaga bersubsidi: ROE; keuangan swasembada (FSS) atau *adjusted return on asset* (AROA) atau subsidi indeks ketergantungan (SDI); dan 6) tingkat efisiensi, yang berkaitan dengan operasi rasio biaya (OER) atau biaya per klien.

Merujuk laporan International Organisation for Migration (2011), yang meneliti kinerja keuangan koperasi, menggunakan analisis penilaian kapasitas koperasi (*Cooperative Capacity Assessment/CCA*) sebagai panduan bagi koperasi dan pemangku kepentingan lain dalam mengukur sejauhmana tingkat kinerja kelembagaan dan usaha koperasi secara menyeluruh dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*), perubahan dan pengambilan keputusan. CCA dirancang untuk pelbagai kebutuhan pengukuran dan pengembangan koperasi secara berkelanjutan. Secara umum hasil penilaian bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan manajemen melalui proses yang partisipatif.

Di Indonesia, sejak tahun 2006 telah dikeluarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) LKM Tahun 2006, yang telah disesuaikan untuk melihat kinerja keuangan LKM. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) LKM Tahun 2006 ini digunakan untuk mengukur mengenai baik buruknya suatu LKM. Kinerja keuangan dapat diketahui dengan menghitung rasio-rasio keuangan sehingga dapat diukur prestasi suatu LKM. Alat yang biasa digunakan untuk mengetahui kinerja tersebut adalah dengan menggunakan analisis rasio. Aspek rasio yang dapat digunakan dalam melihat kinerja keuangan suatu LKM dapat dilihat dari perhitungan *current ratio*, *cash ratio*, ROA, ROE, rasio biaya operasional, *nonperforming loan* (NPL), *loan to deposit ratio* (LDR), dan kebijaksanaan likuiditas yang ketentuan penilaiannya telah disesuaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Bab IV Pasal 6 hasil perhitungan terhadap komponen yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen rentabilitas dan likuiditas diperoleh skor secara keseluruhan. Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan unit simpan-pinjam yang dibagi dalam empat golongan seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor Penilaian Kinerja	Predikat
$80 \leq X \leq 100$	Sehat
$60 \leq X \leq 80$	Cukup sehat
$40 \leq X \leq 60$	Kurang sehat
$20 \leq X \leq 60$	Tidak sehat
≤ 20	Sangat tidak sehat

Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009

TUJUAN

Sebelum menjelaskan tujuan penulisan, lebih dahulu menjelaskan mengapa perempuan yang dijadikan obyek kajian? Dan mengapa wilayah perdesaan (pesisir/nelayan) Kab. Tangerang yang dijadikan lokasi?

LKM terutama koperasi yang berbasis anggota perempuan, pada umumnya memiliki kegiatan yang diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan perempuan baik yang bersifat konsumtif (pembelian barang dan jasa, kegiatan tradisi), produktif (investasi dan usaha) maupun kesehatan reproduksi. Hasil kajian Kementerian Koperasi dan UKM (2007), menilai bahwa Kopwan atau Koperasi yang berbasis anggota perempuan, ternyata mampu membantu kaum perempuan di perdesaan mengaktualisasikan diri. Koperasi sebagai wadah pembelajaran bagi kaum ibu yang lain dan mampu memerangi kemiskinan.

Sementara itu, Kab. Tangerang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di propinsi Banten, yakni sebesar 205.100 jiwa (BPS, 2010). Besarnya jumlah penduduk miskin ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang, yang mencapai 2,8 juta jiwa. Dilihat tingkat disparitas kemiskinan antara Kabupaten/Kota di propinsi Banten, Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi dengan tingkat keparahan 0,36.

Sumber penghasilan utama penduduk miskin di Kab. Tangerang terutama untuk bagian utara adalah nelayan dan selatan adalah sektor pertanian berlahan kering. Sementara di bagian tengah, banyak warga yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh pabrik lepas. Bahkan, banyak rumah tangga yang hidup di sekitar garis kemiskinan dan hampir miskin (sangat rentan terhadap kemiskinan) yang bergulat hidup dalam kondisi *subsisten* (kondisi seadanya).

Berdasarkan alasan itu, tujuan penulisan ini mengungkap kinerja kemandirian keuangan LKM semiformal (koperasi) yang berbasis keanggotaan perempuan di wilayah pesisir (nelayan) Kab. Tangerang. Kinerja kemandirian yang sehat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.

METODE

Lokasi penelitian pada 3 (tiga) kecamatan di wilayah pantai utara (pesisir) Kab. Tangerang, yang dominan penduduknya menggantungkan hidupnya sebagai nelayan, yang meliputi: Pakuhaji (bagian timur), Teluk Naga (bagian tengah), dan Mekar Baru (bagian barat).

Alat analisis yang digunakan adalah analisis kinerja keuangan. Kinerja yang dimaksud, seperti yang diuraikan pada bagian pendahuluan, yakni kinerja kemandirian (keberlanjutan keuangan) (Yaron *et al*, 1997, Meyer, 2002, Ledgerwood, 1999) dan kinerja daya jangkauan terhadap nasabah (Yaron, *et al* 1997 dan Ledgerwood, 1999).

Petunjuk teknis melihat indikator kinerja (keberlanjutan) keuangan, *pertama*, disusun dalam Peraturan Menteri (Permen) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP). Dalam peraturan tersebut, kesehatan LKM dilihat dalam indikator permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian/pertumbuhan, dan jati diri koperasi. *Kedua*, indikator yang disusun oleh Ledgerwood (1999).

Subyek LKM yang berbasis anggota perempuan (institusi LKM semiformal) yang dipilih dengan menggunakan pertimbangan menghitung tingkat kesehatan LKM. Untuk memperoleh informasi tentang tingkat kinerja (kemandirian keuangan) koperasi, digunakan data sekunder dari laporan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Tangerang dan laporan tahunan masing-masing koperasi yang diteliti. Dengan pertimbangan tersebut, ada 3 (tiga) LKM di wilayah pantai utara (pesisir). Pertimbangan pengambilan tiga LKM, didasarkan pada laporan kinerja keuangan yang telah disampaikan ke Dinas Koperasi dan UKM Kab. Tangerang (2013), sehingga dari situ dapat dikomparasikan perbedaan tingkat kesehatan (kinerja) LKM di masing-masing lokasi.

Sementara itu, demi menyederhanakan alat analisis tersebut agar sesuai situasi sosial dan ekonomi lapangan, penelitian ini menggabungkan dan menyederhanakan indikator pada tabel 2, sebagai berikut.

Tabel 2. Indikator Tingkat Kesehatan Keuangan

Indikator	Kepmen Koperasi dan UKM No: 20/Per/M.KUKM/XI/2008	Ledgerwood (1999)
Permodalan	a. Rasio Modal Sendiri b. Rasio Modal Sendiri thdp Pinjaman yg Berisiko c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	
Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio volume pinjaman pd anggota thdp volume pinjaman b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah thdp	

	Volumen Pinjaman c. Rasio cadangan risiko thdp jumlah pinjaman bermasalah	
Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan thdp partisipasi bruto	b. Rasio produktivitas dan efisiensi;
Likuiditas	a. Rasio Kas b. Rasio Volume Pinjaman thdp dana yg diterima	
Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas Aset b. Rentabilitas Modal Sendiri c. Kemandirian Operasional Pelayanan	d. Keberlangsungan pembayaan
Jati Diri Koperasi	a. Rasio Partisipasi Bruto b. Rasio Promosi Anggota	c. Indikator skala dan jangkauan

Untuk melihat tingkat kesehatan keuangan anggota/nasabah biasa diukur dengan *Non Performance Loan* (NPL). Pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank.

NPL merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. NPL dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kredit yang bermasalah dibandingkan dengan total kredit. Berdasarkan SE BI. Nomor 12/ 11 /DPNP tanggal 31 Maret 2010, rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut:

Rasio	Predikat
$NPL \leq 5\%$	Sehat

HASIL DAN PEMBAHASAN

LKM yang memiliki kinerja keuangan yang baik atau sehat/cukup sehat, tentu mempunyai peluang untuk mampu meningkatkan aksesibilitas dalam menjangkau anggotanya (Ledgerwood, 1999; Myer, 2000) dengan catatan LKM tersebut dikelola dengan prinsip *good governance* (ADB, 2000).

Dalam tabel 3 tercatat tingkat kinerja keuangan (kesehatan), NPL, dan daya jangkau LKM ke anggotanya. Demikian juga tingkat tabungan, simpanan, dan penyaluran kredit.

Tabel 2. Kinerja Keuangan Wilayah Nelayan/Pesisir

Indikator	Pakuhaji	Mekar Baru	Mauk
Tingkat Kesehatan	93,40	85,90	79,90
NPL	0,03	0,07	0,06
Jangkauan			
• Desa	13	15	11
• Rembug	217	163	162
• Pusat	6.348	4.334	4.131
• Anggota			
Simpanan	3.565.505.958	1.757.301.818	3.608.281.484
Sukarela/			
Tabungan (Rp)			
Penyaluran	34.717.000.000	20.995.200.000	20.240.600.000
Pembiayaan (Rp)			
Simpanan	4.231.505.958	3.499.655.932	2.073.590.000
Anggota (Rp)			

Sumber: survey, 2014

Sehingga terlihat, tingkat NPL LKM semi-formal yang berada di wilayah nelayan/pesisir sangat rendah ($0,03 < 0,07$). Tingkat kesehatan yang merujuk Permenkop KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 dan kriteria penilaian Ledgerwood (2009) pun tercatat "Sehat". Tingkat tabungan anggota rerata di atas Rp1.500.000.000 < Rp4.000.000.000 yang menandakan bahwa tingkat kepercayaan (*trust*) dan apresiasi masyarakat (anggota) terhadap LKM di wilayah nelayan/pesisir sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan pula oleh jumlah anggota LKM yang terus menanjak, dengan jaringan kelompok-kelompok dan rembug pusat yang

makin meningkat (menjangkau) di pelbagai pelosok desa pesisir/nelayan.

Selain kinerja keuangan dan jangkauan anggota yang dilakukan LKM semiformal pada wilayah masyarakat pesisir, perlu pula diketahui tingkat kemacetan pembayaran pinjaman/pembiayaan anggota. Tentu, kredit macet yang rendah (NPL) dan tingkat pengembalian (*repayment rate/RR*) kredit/pembiayaan yang tinggi (lancar) pada anggota LKM semiformal yang berbasis keanggotaan perempuan seperti yang tergambar pada laporan keuangan LKM, sangat terkait dengan kemampuan institusi dalam melaksanakan program pembiayaan yang sudah didesain lebih awal dan kompatibel dengan keinginan masyarakat (anggota).

Setidaknya, alasan itu berkaitan dengan: *pertama*, suku bunga pinjaman tidak mencekik tinggi, yakni kisaran 6% per tahun. Hal ini berbeda dengan bank harian (lintah darat), lembaga keuangan yang lain, dan bank konvensional; *kedua*, memanfaatkan modal sosial yang dimiliki perempuan, termasuk memanfaatkan pola-pola arisan ibu-ibu rumah tangga yang sudah lama berkembang di masyarakat; *ketiga*, anggota (nasabah) tidak bertransaksi di kantor LKM, tapi petugas LKM itu sendiri "jemput bola" mendatangi kelompok dan rembug pusat (RP) yang sudah disepakati pertemuan mingguan di rumah anggota serta akses jangkauannya hanya berjalan kaki.

Keempat, proses rekrutmen anggota terseleksi sesuai prosedur standar operasional baku (SOP), misalnya, anggota telah lulus uji kelayakan (UK) dan verifikasi data usaha, telah melunasi setoran pokok; telah memiliki sertifikat modal koperasi; sudah memiliki *simpanan minggon* dan sukarela, mengajukan pembiayaan dengan menyebutkan tujuan penggunaannya, dan seterusnya; *kelima*, proses transaksi dan administrasinya tidak rumit, tanpa jaminan (agunan). *Keenam*, bersifat kebersamaan (komunalisme) karena diatur dalam kelompok-kelompok yang ditentukan dari latar visi dan profesi yang sama. *Ketujuh* instrumen produknya terdiri dari pelbagai jenis atau terdiversifikasi sesuai kebutuhan anggota

(tidak semata pembiayaan dalam bentuk *cash*), *kedelapan*, melayani anggota dengan pembiayaan rendah ($x < \text{Rp}1.000.000,00$), dan kesemibilan, adanya program sosial, seperti kegiatan pemberdayaan, termasuk pelatihan, advokasi, dan motivasi yang diberikan oleh petugas LKM dalam setiap pertemuan mingguan atau pertemuan-pertemuan tertentu atas undangan kantor pusat.

Selain itu, tingkat pengembalian pinjaman/pembiayaan anggota dipengaruhi juga secara langsung oleh institusi-institusi informal, yaitu peraturan adat (norma dan sanksi sosial), kohesi sosial dan penggunaan mekanisme sosial dalam menyeleksi pelamar (peminjam) dan menegakkan pelunasan melalui keterlibatan tokoh masyarakat, yang berperan penting dalam menegakkan kemauan anggota dalam mengembalikan pinjaman-/pembiayaan. Misalnya, *pertama*, dalam hal pembentukan rembug pusat (RP) dan kelompok peminjam kerap kali didasari kesamaan budaya dan latar belakang masing-masing anggota kelompok. *Kedua*, adanya kebijakan tanggung renteng di mana setiap anggota kelompok secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap anggota kelompoknya. Jika ada anggota kelompoknya macet dalam pengembalian pinjaman, otomatis anggota kelompok yang lain wajib membayarnya maksimal tiga kali tunggakan.

Ketiga, keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat, aparat desa, aparat RT dan RW, terutama pada awal LKM semi formal ini masuk ke suatu desa melalui tahapan sosialisasi atau pertemuan umum (PU), telah terjadi interaksi dan silaturahmi antara LKM dengan pihak-pihak terkait di lokasi tersebut. Silaturahmi atau interaksi sosial diawal seperti itu telah membangun saling percaya (modal sosial) dalam membentuk social trust. Ihwal seperti itu, tentunya tidak ditemukan pada lembaga-lembaga keuangan formal, seperti bank, BPRS, dan juga tidak ditemukan pada kegiatan keuangan ilegal, termasuk kegiatan rentenir..

Solusi yang digunakan LKM semiformal ini dengan menggunakan pendekatan modal sosial

(*social capital*) seperti yang diungkap Field (2003) dan *social trust* dari Fukuyama (2008) dianggap tepat sesuai keinginan anggota, telah membuat anggota LKM semi formal memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada LKM. Ini pula yang mengonfirmasi mengapa NPL anggota di setiap wilayah itu sangat rendah dan tingkat kesehatan LKM semi-formal berkategori “sehat” dan “cukup sehat”..

Menganalisis pelbagai kegagalan pendekatan dalam memecahkan persoalan pengembalian pinjaman, modal sosial inilah yang dinilai efektif dalam memberikan dorongan keberhasilan bagi pelbagai kebijakan keuangan mikro, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Keyakinan ini didasarkan pada kekuatan yang dimilikinya guna merangsang masyarakat membangun keswadayaan yang hasilnya akan memaksimalkan pencapaian dari setiap kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin (rentan) yang dibuat oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Kinerja kemandirian keuangan LKM yang berbasis anggota perempuan, dapat diukur dari indikator keberlanjutan keuangan. Dengan merujuk Permenkop KUKM No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 dan kriteria penilaian Ledgerwood (2009), maka untuk wilayah pesisir atau nelayan tercatat barkategori “Sehat” (KCP Pakuhaji 93,40, KCP Mekar Baru 85,90, dan KCP Mauk 79,90). Untuk NPL (*Non Performing Loan*) tercatat untuk KCP Pakuhaji 0,03, KCP Mekar Baru 0,07, dan KCP Mauk 0,00. Sementara untuk simpanan anggota, tercatat untuk KCP Pakuhaji sebesar Rp4.231.505.958,00, KCP Mekar Baru sebesar Rp3.499.655.932,00 dan untuk KCP Mauk sebesar Rp2.073.590.000,00. Selanjutnya untuk penyaluran pembiayaan, maka KCP Pakuhaji sebesar Rp34.717.000.000,00 untuk KCP Mekar Baru sebesar Rp20.995.200.000,00 dan untuk KCP Mauk sebesar Rp20.240.600.000,00.

Untuk kredit macet yang rendah (NPL atau *non performing loan*) dan tingkat pengembalian (RR atau *repayment rate*) kredit/pembiayaan yang tinggi (lancar) pada anggota LKM semiformal yang berbasis keanggotaan perempuan seperti yang tergambar pada laporan keuangan LKM, sangat terkait dengan kemampuan institusi dalam melaksanakan program pembiayaan yang sudah didesain lebih awal dan kompatibel dengan keinginan masyarakat (anggota).

DAFTAR PUSTAKA

- Aruna, M & Jyothirmayi, R. 2011. The Role of Microfinance in Women Empowerment: A Study on the SHG Bank Linkage Program in Hyderabad (Andhra Pradesh). *Indian Journal of Commerce & Management Studies*, pp. 77-95
- Arsyad, L. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja, dan Sustainability*. Penerbit: Andi, Yogyakarta.
- Arsyad, L. 2005, *An Assessment of Performance and Sustainability of Microfinance Institutions: A Case Study of Village Credit Institutions in Gianyar, Bali, Indonesia*. Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy Faculty of Social Sciences, Flinders University Adelaide, Australia
- Biro Pusat Statistik, Propinsi Banten. 2009-2012, *Laporan Statistik Propinsi Banten*. Serang. h. 40-45
- CGAP. 1997. *State-Owned Development Banks in Microfinance*, Focus Note No. 10. Washington D.C.: Consultative Group to Assist the Poor.
- Christen, R.B., E Rhyne, & R. Vogel. 1995. Maximizing the Outreach of Microenterprise Finance: The Emerging Lesson of Successful Programs, *Focus Note.2* Washington, D.C. CGAP.
- Chowdhury, A. 2008. Women, Poverty and Empowerment: An Investigation into the Dark Side of Microfinance. *Journal of Asian Affairs*, Vol. 30, No. 2 : 16-29.
- Creswell, J. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage, Los Angeles. USA.
- Chaves, R & Gonzalez-Vega. 1996. *The Design of Successful Rural Financial Intermediaries: Evidence from Indonesia*. Economics and Sociology Occasional Paper No. 2059. Rural Finance Program Department of Agricultural Economics and Rural Sociology. The Ohio State University. 2120 Fyffe Road Columbus, Ohio 43210-1099.
- Devaney, P, Loubière & Rhyne. 2004. *Supervision and Regulation in Microfinance: Lessons from Bolivia, Colombia and Mexico*. Washington, D.C.: ACCION International.
- Field, J. 2003, *Modal Sosial* (terjemahan: Social Capital, London, Routledge, London), Penerbit: Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Fukuyama, F. 2010. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Penerbit: Qalam Yogyakarta (Cetakan Kedua). Yogyakarta.
- Hartarska, V. 2009. The Impact of Outside Control in Microfinance. *Journal of Managerial Finance* Vol. 35 No. 12, pp. 87-95
- Kabeer, N. 2008. *Mainstreaming Gender in Social Protection for the Informal Economy*. London: Commonwealth Secretariat.
- Kereta, B.B. 2007. *Outreach and Financial Performance Analysis of Microfinance Institutions in Ethiopia*. African Economic Conference United Nations Conference Center (UNCC), Addis Ababa, Ethiopia: 15-17 November 2007.
- Khandker, S. 1999. *Fighting Poverty with Microcredit: Experience in Bangladesh*. New York: Oxford University Press
- Khandker, S. 2005. Microfinance and poverty: evidence using panel data from Bangladesh *World Bank Economic Review*, Vol. 19, No. 2, pp. 263-286.

- Ledgerwood, J. 1999. *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. Washington, DC, Banco Mundial.
- Ledgerwood, J. 2009. *Sustainable Banking with the Poor. Microfinance Handbook. An Institutional and Financial Perspective*. The World Bank. Washington D.C. 20433, USA.
- Leikem, K. 2012. *Microfinance: A Tool for Poverty Reduction?*. Senior Honors Projects. Paper 300.
<http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/300>
- Lennon, B & Richardson. 2002. Teaching Old Dogs New Tricks: The Commercialization of Credit Unions. *The Commercialization of Microfinance: Balancing Business and Development*. Bloomfield: Kumarian Press.
- Mayoux, L. 1999. Questioning Virtuous Spiral: Micro-Finance and Women's Empowerment in Africa. *Journal of International Development*, Vol. 23.p. 323-334
- Meyer, R. L. 2012. *Track record of financial*. ADB Institute, Research Paper Series, (49), 1-35.
- Rai, A & Anil, K. 2011. Financial Performance of Microfinance Institutions: Bank vs NBFC. *International Journal of Management and Strategy*.
[Http://www.myresearchpie.com/](http://www.myresearchpie.com/) (IJMS) 2011, Vol. No.II, Issue II, January-June 2011. New Delhi. ISSN: 2231-0703. pp. 50-74
- Rajivan, A. 2003, *Credit and Women's Empowerment: A Case Study Of SML (SHARE Microfinance Ltd.)*, United Nations Development Program (UNDP).
- Rosenberg, R. 1999. *Measuring Microcredit Delinquency: Ratios Can Be Harmful to Your Health*. Occasional Paper 3. Washington, D.C.: CGAP.
<http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.2698/>
- Rural Poverty Report 2011, *International Fund for Agricultural Development Publications Rural Poverty Report 2011*, IFAD (<http://www.ifad.org/rpr2011/index.htm>)
- Schreiner, M., & Yaron, J. 1999. Development Finance Institutions: Measuring Their Subsidy. *Journal of Microfinance Risk Management*. Vol. 24, p. 74-87
- The World Bank, FAO, IFAD, 2009, *Agriculture and Rural Development: Gender in Agriculture Sourcebook*. Washington, DC.
- The World Bank. 2011. *Innovations in Microfinance*. Washington, D.C: World Bank.
- TRIAS Foundation Report. 2005. *Performance Evaluation of MFIs*, TRIAS training session, Brussels, January 2005.
- Yaron, J, Benjamin, and Piprek. 1997. *Rural Finance: Issues, Design, and Best Practices*. Environmentally and Socially Sustainable Development Studies and Monographs Series 14. Washington, D.C.: World Bank.
- Yunus, M. & Alan Jolis. 1999. *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle against World Poverty*, New York: Public Affair.
- Yunus, M. 2007. *Creating World Without Poverty*. (terjemahan: Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan), Penerbit: Gramedia Jakarta.
- Women's World Banking. 2005. *Expert Group + 10: Building Domestic Financial Systems that Work for the Majority*. New York: Women's World Banking, April.
- Peraturan Menteri (Permen) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)
- UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).